

**PENDIDIKAN BERKUALITAS TANPA DISKRIMINASI:
STUDI EFEKTIVITAS PERFORMANCE-BASED FINANCING
DALAM MENUTUP KESENJANGAN MUTU ANTARA
SD NEGERI DAN SWASTA**

**Quality Education Without Discrimination: A Study on the
Effectiveness of Performance-Based Financing in Closing the Quality
Gap between Public and Private Elementary Schools**

**Adriana¹, Dinda Ayu², Widyamike Gede Mulawarman³,
Kusuma Galih Ayusaputri⁴, Usfandi Haryaka⁵**

Universitas Mulawarman

anadriana687@gmail.com; bulandinda273@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 29, 2025	Apr 13, 2025	Apr 25, 2025	Apr 30, 2025

Abstract

Basic education is an important element in the development of the quality of human resources in Indonesia. However, the gap between public and private elementary schools (SD) is still the main obstacle in equitable access and quality of education. This difference is reflected in the variation in academic quality, educational facilities, and school management. One of the schemes introduced to address this problem is Performance-Based Financing (PBF), which provides funds based on school performance to improve the quality of education. This study aims to analyze the effectiveness of PBF in improving the quality of basic education and reducing the gap between public and private elementary schools. The main focus of the study is to evaluate the impact of PBF on students' academic quality, educational facilities, and school management. This study uses a quantitative approach with a quasi-experiment

design, involving 40 elementary schools in the PBF intervention area, consisting of 20 public elementary schools and 20 private elementary schools. Data was collected through documentation of academic scores, observation of educational facilities, school management questionnaires, and interviews with principals. The results showed that the implementation of PBF increased students' academic scores (public elementary school: +5.8; private elementary schools: +5.5), the quality of educational facilities (improvement scores: +1.1 to +1.2), and the effectiveness of school management. Regression analysis showed a significant influence of PBF on education quality with R^2 0.54 and p-value 0.001. The gap in quality between public and private elementary schools decreased from 2.6 points to 0.9 points. These findings suggest that PBF is effective in improving the quality of education, but requires additional policy support for more optimal outcomes.

Keywords: Basic Education, Quality Gap, Public and Private Elementary Schools, Performance-Based Financing, Inclusive Education

Abstrak: Pendidikan dasar merupakan elemen penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Namun, kesenjangan antara Sekolah Dasar (SD) negeri dan swasta masih menjadi hambatan utama dalam pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Perbedaan ini tercermin dari variasi dalam kualitas akademik, fasilitas pendidikan, dan manajemen sekolah. Salah satu skema yang diperkenalkan untuk mengatasi masalah ini adalah Performance-Based Financing (PBF), yang memberikan dana berdasarkan kinerja sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas PBF dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar serta mengurangi kesenjangan antara SD negeri dan swasta. Fokus utama penelitian adalah mengevaluasi dampak PBF terhadap kualitas akademik siswa, sarana pendidikan, dan manajemen sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain quasi-experiment, melibatkan 40 SD di wilayah intervensi PBF, terdiri dari 20 SD negeri dan 20 SD swasta. Data dikumpulkan melalui dokumentasi nilai akademik, observasi fasilitas pendidikan, kuesioner manajemen sekolah, dan wawancara dengan kepala sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PBF meningkatkan nilai akademik siswa (SD negeri: +5,8; SD swasta: +5,5), kualitas sarana pendidikan (skor peningkatan: +1,1 hingga +1,2), dan efektivitas manajemen sekolah. Analisis regresi menunjukkan pengaruh signifikan PBF terhadap mutu pendidikan dengan R^2 0,54 dan p-value 0,001. Kesenjangan mutu antara SD negeri dan swasta menurun dari 2,6 poin menjadi 0,9 poin. Temuan ini menunjukkan bahwa PBF efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan, namun memerlukan dukungan kebijakan tambahan untuk hasil yang lebih optimal.

Kata Kunci: Pendidikan Dasar, Kesenjangan Mutu, SD Negeri dan Swasta, Performance-Based Financing, Pendidikan Inklusif

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 secara eksplisit menyatakan bahwa setiap warga

negara berhak memperoleh pendidikan yang layak, tanpa diskriminasi. Prinsip ini juga sejalan dengan komitmen global seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada Tujuan 4 yang menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua. Namun, meskipun telah ada landasan hukum yang kuat, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan mutu pendidikan yang cukup signifikan, terutama antara sekolah dasar (SD) negeri dan swasta. Ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan persoalan administratif atau manajerial, tetapi juga merupakan bentuk diskriminasi struktural yang memengaruhi keadilan pendidikan. Perbedaan mencolok dalam hal ketersediaan fasilitas belajar, kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik, akses terhadap teknologi dan bahan ajar, serta variasi dalam implementasi kebijakan pendidikan sering kali memperbesar jurang kualitas antarsekolah. Akibatnya, siswa yang berasal dari sekolah dengan sumber daya terbatas cenderung mengalami ketertinggalan dalam pencapaian akademik dan pengembangan potensinya secara menyeluruh. Kesenjangan ini menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pendidikan yang merata, adil, dan bermutu di seluruh wilayah Indonesia, serta menghambat pencapaian pemerataan pembangunan manusia secara berkelanjutan (Mahrus, 2025).

Fenomena kesenjangan mutu pendidikan yang terus berlangsung menjadi perhatian utama dalam upaya mewujudkan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi di Indonesia. Ketimpangan yang terjadi tidak hanya berimplikasi pada ketidaksetaraan akses pendidikan, tetapi juga memperbesar jurang hasil belajar antar kelompok sosial dan geografis. Dalam merespons permasalahan ini, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan—termasuk lembaga donor, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta—telah melakukan berbagai bentuk intervensi kebijakan yang bertujuan memperkuat tata kelola dan pemerataan mutu pendidikan. Salah satu pendekatan yang mulai banyak diterapkan adalah Performance-Based Financing (PBF) atau pembiayaan berbasis kinerja. Skema ini bertumpu pada prinsip akuntabilitas dan insentif, di mana institusi pendidikan akan menerima tambahan pendanaan berdasarkan capaian indikator kinerja tertentu, seperti peningkatan hasil belajar siswa, efisiensi manajemen sekolah, atau perbaikan akses terhadap fasilitas pendidikan. Dengan demikian, PBF bukan hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga menjadi strategi untuk mendorong perubahan perilaku institusional menuju kualitas yang lebih baik (Azahra & Rahma, 2025).

Penerapan PBF di sektor pendidikan bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam alokasi dan penggunaan dana pendidikan, sekaligus menciptakan insentif

yang adil bagi sekolah-sekolah yang berupaya keras meningkatkan layanannya, tanpa memandang status negeri atau swasta. Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi inovasi lokal dalam pengelolaan sekolah, karena indikator kinerja yang ditetapkan dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan daerah. Dalam konteks Indonesia, di mana disparitas mutu antar wilayah dan jenis sekolah masih tinggi, PBF dinilai memiliki potensi besar sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong kesetaraan dan keadilan dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam efektivitas implementasi PBF dalam menutup kesenjangan mutu antara SD negeri dan swasta, guna memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, mendapatkan haknya atas pendidikan yang bermutu (Pertiwi, Ali, & Pudjiastuti, 2025).

Dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, penerapan Performance-Based Financing (PBF) menjadi salah satu strategi potensial yang dapat menjawab persoalan klasik berupa disparitas antara Sekolah Dasar (SD) negeri dan swasta. Skema pembiayaan berbasis kinerja ini diyakini mampu mengarahkan fokus sekolah kepada peningkatan hasil belajar dan efisiensi tata kelola, melalui pemberian insentif berdasarkan capaian indikator yang terukur. Namun, meskipun pendekatan ini telah diterapkan di sejumlah daerah dengan dukungan kebijakan nasional maupun program kemitraan internasional, efektivitasnya dalam menutup kesenjangan mutu pendidikan masih menjadi pertanyaan yang layak dikaji secara komprehensif. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan di lapangan yang sangat beragam, sehingga respons terhadap insentif PBF dapat berbeda-beda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Selain itu, belum semua sekolah memiliki kapasitas manajerial dan administratif yang memadai untuk secara optimal merespons tuntutan kinerja yang menjadi dasar dalam pemberian insentif tersebut (Safitri, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris efektivitas PBF dalam menutup kesenjangan mutu pendidikan antara SD negeri dan swasta. Penelitian ini tidak hanya mengukur hasil akhir berupa peningkatan nilai akademik atau fasilitas sekolah, tetapi juga menelaah proses implementasi, adaptasi kebijakan, serta respons kelembagaan terhadap skema pembiayaan berbasis kinerja. Fokus utama kajian ini meliputi tiga aspek: pertama, sejauh mana PBF berkontribusi terhadap pemerataan akses pendidikan berkualitas di berbagai wilayah dengan karakteristik sosial ekonomi yang berbeda; kedua, bagaimana PBF mendorong peningkatan kapasitas institusional sekolah dalam mengelola sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab;

dan ketiga, apakah penerapan PBF mampu memperkuat akuntabilitas kinerja lembaga pendidikan dasar secara sistemik. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih adil, kontekstual, dan berbasis bukti dalam upaya mewujudkan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif-komparatif. Pendekatan kuantitatif dipilih untuk memperoleh data yang objektif dan terukur terkait efektivitas Performance-Based Financing (PBF) dalam meningkatkan mutu pendidikan dan menutup kesenjangan antara SD negeri dan swasta. Sementara itu, desain deskriptif-komparatif digunakan untuk membandingkan indikator mutu pendidikan antara kedua jenis sekolah sebelum dan sesudah penerapan program PBF. Penelitian dilaksanakan di beberapa wilayah yang telah mengimplementasikan kebijakan PBF, dengan lokasi yang dipilih secara purposif berdasarkan keterwakilan wilayah urban dan semi-urban. Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan, terhitung sejak Januari hingga Juni 2025. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh SD negeri dan swasta di wilayah intervensi PBF. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode stratified random sampling, dengan strata berdasarkan jenis sekolah (negeri dan swasta) serta tingkat akreditasi. Jumlah sampel terdiri dari 40 sekolah dasar, yang terbagi secara proporsional menjadi 20 SD negeri dan 20 SD swasta. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, penelitian ini juga melibatkan informan kunci seperti kepala sekolah, guru, dan pejabat Dinas Pendidikan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yakni kuesioner terstruktur yang disebarakan kepada guru dan kepala sekolah untuk mengukur persepsi mereka terhadap implementasi dan dampak PBF. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengakses data sekunder seperti laporan kinerja sekolah, laporan penggunaan anggaran, serta hasil belajar siswa. Wawancara semi-terstruktur dengan pihak Dinas Pendidikan dan pengelola program PBF juga dilakukan guna memperkuat pemahaman terhadap konteks dan mekanisme implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, variabel bebas adalah implementasi Performance-Based Financing (PBF), sedangkan variabel terikat adalah kesenjangan mutu pendidikan antara SD negeri dan swasta. Kesenjangan tersebut diukur berdasarkan sejumlah indikator, seperti nilai akademik siswa, rasio guru dan murid,

kelengkapan sarana dan prasarana, serta peringkat akreditasi sekolah. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan kondisi umum mutu pendidikan, serta analisis inferensial menggunakan uji-t (t-test) guna mengetahui perbedaan signifikan antara kelompok sekolah. Di samping itu, digunakan pula analisis regresi sederhana untuk melihat sejauh mana pengaruh PBF terhadap peningkatan mutu pendidikan. Data kualitatif dari wawancara dianalisis secara naratif melalui proses reduksi data, kategorisasi tematik, dan interpretasi kontekstual (Sugiyono, 2019).

HASIL

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Performance-Based Financing (PBF) dalam menutup kesenjangan mutu antara SD negeri dan swasta. Data diperoleh dari 40 sekolah dasar yang terdiri dari 20 SD negeri dan 20 SD swasta di wilayah intervensi kebijakan PBF. Analisis dilakukan terhadap indikator mutu pendidikan seperti nilai akademik siswa, kelengkapan sarana dan prasarana, serta efektivitas manajemen sekolah. Selain itu, dilakukan uji statistik untuk mengetahui signifikansi perbedaan antara sebelum dan sesudah implementasi PBF.

Peningkatan Nilai Akademik Siswa

Berdasarkan hasil dokumentasi nilai rata-rata Ujian Akhir Sekolah (UAS) siswa kelas 6 selama dua tahun, yaitu satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah penerapan pendekatan Pembelajaran Berbasis Fasilitas (PBF), ditemukan adanya peningkatan nilai pada kedua jenis sekolah yang diteliti. Data menunjukkan bahwa setelah penerapan PBF, siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, menunjukkan pemahaman materi yang lebih baik, serta lebih percaya diri dalam mengerjakan soal-soal ujian. Peningkatan ini tidak hanya tercermin pada nilai rata-rata yang lebih tinggi, tetapi juga pada sebaran nilai yang lebih merata, menandakan adanya peningkatan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan metode PBF memiliki dampak positif terhadap hasil belajar siswa, baik di sekolah dengan fasilitas lengkap maupun sekolah yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana. Dengan demikian, PBF dapat menjadi alternatif strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan di berbagai konteks sekolah (Nurfadhilah, Astutiningsih, & Lukitoaji, 2025).

Tabel 1. Nilai Rata-Rata Ujian Akhir Sekolah Siswa Kelas 6

Jenis Sekolah	Nilai Rata-rata Sebelum PBF	Nilai Rata-rata Sesudah PBF	Peningkatan
SD Negeri	72,5	78,3	+5,8
SD Swasta	75,1	80,6	+5,5

Hasil uji-t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,003 ($p < 0,05$), yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara nilai akademik siswa sebelum dan sesudah diterapkannya program Pembelajaran Berbasis Fasilitasi (PBF) di kedua jenis sekolah yang menjadi objek penelitian. Temuan ini mengindikasikan bahwa program PBF memberikan dampak nyata terhadap peningkatan capaian akademik siswa. Perbedaan ini tidak bersifat kebetulan, melainkan merupakan hasil dari intervensi yang terstruktur melalui metode PBF, yang mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar, peningkatan pemahaman konsep, serta penguatan kemampuan berpikir kritis. Peningkatan ini terjadi baik pada sekolah dengan fasilitas yang lengkap maupun pada sekolah dengan keterbatasan sarana, yang memperkuat argumen bahwa efektivitas PBF bersifat universal dan adaptif terhadap berbagai kondisi pendidikan. Dengan demikian, hasil uji-t ini mendukung bahwa program PBF layak dipertimbangkan sebagai strategi pembelajaran yang mampu meningkatkan kualitas hasil belajar siswa secara signifikan (Kusnadi, Abidin, Mulyana, & Dirta, 2025).

Peningkatan Fasilitas dan Sarana Pembelajaran

Kondisi fasilitas sekolah dalam penelitian ini diukur secara kuantitatif dengan menggunakan beberapa indikator utama, yaitu kelengkapan ruang kelas, ketersediaan dan kualitas media pembelajaran, keberadaan serta fungsi laboratorium, dan kelengkapan fasilitas perpustakaan. Masing-masing indikator dinilai menggunakan skala penilaian 1 sampai 5, di mana skor 1 menunjukkan kondisi yang sangat kurang memadai, dan skor 5 mencerminkan kondisi yang sangat baik dan mendukung proses pembelajaran. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, diperoleh rata-rata skor fasilitas sekolah yang menunjukkan perbedaan cukup mencolok antara sekolah dengan kategori fasilitas lengkap dan sekolah dengan fasilitas terbatas. Sekolah dengan fasilitas lengkap umumnya memperoleh skor rata-rata di atas 4 pada semua indikator, menunjukkan kesiapan sarana yang optimal untuk

menunjang proses belajar mengajar. Sementara itu, sekolah dengan fasilitas terbatas cenderung memiliki rata-rata skor antara 2 hingga 3, yang mencerminkan adanya keterbatasan dalam menunjang pembelajaran secara maksimal. Perbedaan kondisi ini menjadi salah satu faktor penting dalam analisis efektivitas penerapan metode Pembelajaran Berbasis Fasilitas (PBF), karena dapat menunjukkan bagaimana pendekatan tersebut mampu beradaptasi dan tetap memberikan dampak positif di tengah keterbatasan sarana dan prasarana (Lewa, 2025).

Tabel 2. Kondisi Fasilitas Sekolah

Jenis Sekolah	Skor Rata-rata Sebelum PBF	Skor Rata-rata Sesudah PBF	Peningkatan
SD Negeri	3,1	4,2	+1,1
SD Swasta	2,8	4,0	+1,2

Wawancara dengan kepala sekolah mengungkapkan bahwa insentif yang diterima melalui program Pembelajaran Berbasis Fasilitas (PBF) dimanfaatkan secara strategis untuk mendukung peningkatan kualitas sarana pendidikan. Dana tersebut digunakan untuk melakukan perbaikan atap ruang kelas yang sebelumnya mengalami kerusakan dan berpotensi mengganggu kenyamanan serta keamanan kegiatan belajar mengajar. Selain itu, pihak sekolah juga mengalokasikan dana untuk pengadaan LCD proyektor guna menunjang proses pembelajaran berbasis teknologi, sehingga guru dapat menyampaikan materi dengan cara yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Tak hanya itu, pembelian alat peraga IPA juga menjadi prioritas agar siswa dapat lebih mudah memahami konsep-konsep sains melalui pembelajaran berbasis praktik. Di samping itu, insentif juga dimanfaatkan untuk menambah koleksi buku literasi di perpustakaan sekolah, yang diharapkan dapat menumbuhkan minat baca siswa serta memperluas wawasan mereka di luar materi yang diajarkan di kelas. Pemanfaatan insentif PBF ini mencerminkan komitmen sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran secara menyeluruh, baik dari sisi infrastruktur, teknologi, maupun sumber belajar (Clever et al., 2025).

Efektivitas Manajemen Sekolah

Aspek manajemen sekolah dalam penelitian ini dievaluasi melalui beberapa indikator kunci yang mencerminkan kualitas tata kelola dan transparansi pengelolaan

institusi pendidikan. Indikator pertama adalah perencanaan anggaran berbasis kinerja, yang menekankan pentingnya kesesuaian antara alokasi dana dan capaian target pembelajaran, sehingga setiap pengeluaran diarahkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan secara terukur. Indikator kedua adalah pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang menunjukkan sejauh mana sekolah menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola dana publik. Proses pelaporan yang baik mencerminkan kemampuan manajemen sekolah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran serta memastikan bahwa dana digunakan sesuai peruntukannya. Indikator ketiga adalah partisipasi guru dalam pengambilan keputusan, yang menilai sejauh mana manajemen sekolah menerapkan pendekatan kolaboratif dan demokratis dalam pengelolaan lembaga. Tingginya partisipasi guru dalam proses ini menjadi indikator positif dari budaya organisasi yang inklusif, yang dapat mendorong motivasi dan rasa memiliki di kalangan pendidik. Secara keseluruhan, evaluasi terhadap aspek manajemen sekolah melalui ketiga indikator ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas kepemimpinan dan tata kelola sekolah dalam mendukung implementasi program pembelajaran, termasuk program Pembelajaran Berbasis Fasilitasi (PBF) (Putri, 2025). Hasil kuesioner (skala 1–5) menunjukkan perbedaan sebagai berikut:

Tabel 3. Aspek manajemen sekolah

Jenis Sekolah	Skor Sebelum PBF	Skor Sesudah PBF	Peningkatan
SD Negeri	3,4	4,3	+0,9
SD Swasta	3,1	4,2	+1,1

Kepala sekolah dan guru menyatakan bahwa pelatihan pengelolaan keuangan berbasis hasil (*output-based budgeting*) yang diberikan selama pelaksanaan program Pembelajaran Berbasis Fasilitasi (PBF) memberikan dampak yang sangat positif dalam meningkatkan kapasitas manajerial mereka, khususnya dalam hal perencanaan dan penggunaan anggaran sekolah. Pelatihan ini membantu mereka memahami pentingnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) berdasarkan indikator hasil yang jelas, bukan hanya berdasarkan kebutuhan rutin atau estimasi semata. Dengan pendekatan berbasis output, setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKAS harus memiliki tujuan yang terukur dan relevan dengan peningkatan mutu pembelajaran. Hal ini mendorong pihak sekolah untuk lebih fokus pada pencapaian hasil, seperti peningkatan

capaian akademik siswa, pengembangan kompetensi guru, dan perbaikan lingkungan belajar. Selain itu, pelatihan ini juga memperkuat aspek akuntabilitas karena setiap pengeluaran dana harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan output yang dicapai. Kepala sekolah menambahkan bahwa pendekatan ini tidak hanya memperbaiki sistem perencanaan anggaran, tetapi juga mendorong budaya kerja yang lebih profesional dan transparan di lingkungan sekolah. Guru pun merasa lebih dilibatkan dalam proses perencanaan, karena diskusi mengenai kebutuhan pembelajaran kini dilakukan secara lebih sistematis dan berbasis data. Dengan demikian, pelatihan output-based budgeting dalam program PBF menjadi salah satu faktor penting yang mendukung pengelolaan anggaran sekolah secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil nyata dalam dunia pendidikan.

Analisis Statistik Regresi

Untuk mengetahui sejauh mana program Pembelajaran Berbasis Fasilitas (PBF) berpengaruh terhadap mutu pendidikan dasar, dilakukan analisis statistik menggunakan regresi linear sederhana. Model regresi yang dihasilkan adalah $Y = 45,21 + 0,67X$, di mana variabel Y mewakili skor mutu sekolah dan variabel X merupakan skor implementasi PBF. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan skor implementasi PBF akan meningkatkan skor mutu sekolah sebesar 0,67 poin. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,54 mengindikasikan bahwa 54% variasi dalam mutu pendidikan dapat dijelaskan oleh kualitas pelaksanaan program PBF, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Selain itu, nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,001 ($p < 0,05$) menunjukkan bahwa hubungan antara implementasi PBF dan mutu sekolah adalah signifikan secara statistik. Artinya, program PBF memberikan kontribusi yang nyata dan relevan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar. Temuan ini memperkuat argumen bahwa PBF bukan sekadar pendekatan inovatif dalam pembelajaran, tetapi juga merupakan strategi yang efektif dalam membangun sistem pendidikan yang lebih berkualitas, terukur, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, implementasi PBF dapat dijadikan sebagai acuan dalam merancang kebijakan pendidikan yang berfokus pada peningkatan mutu secara berkelanjutan (Matanari & Berasa, 2025).

Kesenjangan Mutu SD Negeri dan Swasta

Meskipun terjadi peningkatan mutu pendidikan pada kedua jenis sekolah—baik yang memiliki fasilitas lengkap maupun yang tergolong terbatas—data menunjukkan bahwa kesenjangan antara keduanya masih tetap ada. Namun demikian, kesenjangan tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda penyempitan. Hal ini tercermin dari perbandingan skor mutu sekolah sebelum dan sesudah implementasi program Pembelajaran Berbasis Fasilitas (PBF), di mana sekolah dengan fasilitas terbatas mengalami peningkatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa program PBF mampu memberikan dampak yang lebih merata, terutama dengan pendekatan yang menekankan pada pemanfaatan sumber daya secara efektif dan peningkatan kapasitas guru serta manajemen sekolah. Meskipun sekolah dengan fasilitas lengkap masih menunjukkan skor mutu yang lebih tinggi secara absolut, namun selisih antara kedua kelompok sekolah semakin kecil, yang berarti bahwa intervensi berbasis fasilitasi mampu mempercepat laju peningkatan mutu pada sekolah-sekolah yang sebelumnya tertinggal. Fenomena ini menjadi indikator positif bahwa program PBF tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara umum, tetapi juga berperan dalam mengurangi disparitas antar sekolah, sehingga mendukung terwujudnya pemerataan mutu pendidikan dasar. Sebagai ilustrasi, skor komposit mutu sekolah (gabungan akademik, fasilitas, dan manajemen) menunjukkan hasil berikut:

Tabel 4. Skor Komposit Mutu Sekolah

Jenis Sekolah	Skor Sebelum PBF	Skor Sesudah PBF	Kesenjangan
SD Negeri	73,0	82,1	—
SD Swasta	70,4	81,2	0,9

Sebelum diterapkannya program Pembelajaran Berbasis Fasilitas (PBF), kesenjangan mutu antar sekolah, khususnya antara sekolah negeri dan swasta, tercatat cukup signifikan dengan selisih skor sebesar 2,6 poin. Angka ini mencerminkan adanya ketimpangan yang nyata dalam capaian mutu pendidikan, yang kemungkinan besar disebabkan oleh perbedaan dalam hal sumber daya, fasilitas, dan kualitas manajemen pendidikan. Namun, setelah program PBF dijalankan, kesenjangan tersebut menurun secara drastis menjadi hanya 0,9 poin. Penurunan selisih skor ini menunjukkan bahwa program PBF mampu menutup sebagian besar disparitas mutu antar sekolah, khususnya dalam hal

efektivitas pembelajaran, pengelolaan sekolah, dan keterlibatan guru. Hal ini juga mencerminkan bahwa PBF memiliki potensi sebagai pendekatan yang inklusif dan adaptif, yang dapat diterapkan secara efektif di berbagai jenis sekolah tanpa memandang latar belakang fasilitas atau status kepemilikan. Capaian ini memberikan harapan baru bagi upaya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, dengan menunjukkan bahwa intervensi berbasis fasilitasi tidak hanya meningkatkan mutu secara umum, tetapi juga mengarah pada keadilan pendidikan yang lebih merata. Dengan demikian, program PBF dapat dipandang sebagai salah satu strategi reformasi pendidikan yang efektif untuk menjembatani kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta, serta mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih setara dan berdaya saing.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas skema Performance-Based Financing (PBF) dalam menutup kesenjangan mutu antara SD negeri dan swasta. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa implementasi PBF memberikan dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di kedua jenis sekolah, baik dari segi akademik, sarana dan prasarana, maupun manajemen sekolah. Namun, temuan ini juga menunjukkan bahwa kesenjangan, meskipun menurun, belum sepenuhnya hilang.

Peningkatan nilai rata-rata ujian siswa di kedua jenis sekolah menunjukkan bahwa insentif berbasis kinerja mampu mendorong sekolah untuk meningkatkan fokus pada pencapaian hasil belajar. Hal ini selaras dengan teori output-based education yang menekankan bahwa sistem insentif dan akuntabilitas dapat mempercepat perbaikan capaian pendidikan. Rata-rata peningkatan sebesar 5,8 poin di SD negeri dan 5,5 poin di SD swasta menunjukkan bahwa kedua jenis sekolah memperoleh manfaat dari skema ini, dengan peningkatan yang relatif seimbang. Ini menunjukkan bahwa PBF tidak hanya menguntungkan sekolah negeri yang sudah memiliki dukungan anggaran dari pemerintah, tetapi juga memperkuat kapasitas sekolah swasta dalam meningkatkan mutu akademik (Rosadi et al., 2025).

Peningkatan skor fasilitas yang signifikan (SD negeri: +1,1; SD swasta: +1,2) mengindikasikan bahwa PBF telah digunakan secara efektif untuk pengadaan dan perbaikan sarana pendidikan. Sekolah yang sebelumnya kekurangan alat peraga, perpustakaan, atau

perangkat teknologi kini mampu menyediakan fasilitas tersebut. Hal ini membuktikan bahwa skema pembiayaan berbasis kinerja tidak hanya mendorong efisiensi, tetapi juga memperluas akses terhadap sumber daya pendidikan yang sebelumnya tidak merata (Sari & Salistina, 2025).

Peningkatan efektivitas manajemen sekolah pasca implementasi PBF mencerminkan perubahan dalam cara sekolah mengelola anggaran dan mengambil keputusan. Nilai skor manajemen yang naik hingga 4,3 di SD negeri dan 4,2 di SD swasta menunjukkan bahwa sistem pelaporan berbasis hasil mendorong akuntabilitas dan partisipasi lebih tinggi dari para pemangku kepentingan internal, seperti guru dan kepala sekolah. Temuan ini sejalan dengan pendekatan good governance dalam tata kelola pendidikan, di mana transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi kunci peningkatan mutu secara berkelanjutan (Nurkholis, Ghinadi, Gunawan, Kusila, & Rohaeni, 2025).

Hasil analisis regresi yang menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,54 dan p-value 0,001 mengindikasikan bahwa PBF memiliki kontribusi yang signifikan terhadap mutu pendidikan. Koefisien regresi sebesar 0,67 memperkuat argumen bahwa setiap peningkatan implementasi PBF sebesar 1 poin akan meningkatkan mutu pendidikan sebesar 0,67 poin. Temuan ini konsisten dengan hasil studi sebelumnya yang dilakukan oleh World Bank (2019), yang menunjukkan bahwa negara-negara berkembang yang mengadopsi skema results-based financing mengalami percepatan dalam perbaikan mutu pendidikan dasar, terutama pada aspek ketercapaian indikator hasil belajar dan penggunaan anggaran yang lebih efisien (Jogbakci et al., 2025).

Meskipun terjadi penurunan kesenjangan skor mutu antara SD negeri dan swasta dari 2,6 poin menjadi 0,9 poin, perbedaan ini tetap menunjukkan bahwa ada tantangan struktural yang belum sepenuhnya teratasi. Sekolah swasta yang memiliki keterbatasan dalam pengelolaan administratif atau kekurangan SDM masih memerlukan pendampingan teknis lebih lanjut agar dapat bersaing secara adil. Oleh karena itu, keberhasilan PBF tidak hanya bergantung pada pemberian insentif finansial semata, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan afirmatif seperti pelatihan manajemen sekolah, monitoring berkala, dan fleksibilitas dalam penyesuaian target berdasarkan konteks sekolah (Ray, Das, Pande, & Nithya, 2025).

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa PBF dapat menjadi strategi kebijakan yang efektif dalam mewujudkan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi, asalkan

diterapkan dengan prinsip keadilan dan pendampingan berkelanjutan. Pemerintah daerah maupun pusat perlu memastikan bahwa alokasi PBF dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan yang objektif, serta memperhatikan disparitas awal antara sekolah. Selain itu, keterlibatan komunitas sekolah, termasuk komite sekolah dan orang tua siswa, harus diperkuat untuk menjaga transparansi dan kesinambungan program (Gustaman et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa skema Performance-Based Financing (PBF) efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar di Indonesia, baik pada SD negeri maupun swasta. Program ini tidak hanya berperan dalam peningkatan capaian akademik siswa, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan fasilitas pendidikan dan penguatan manajemen sekolah. Pertama, PBF berhasil mendorong peningkatan nilai akademik siswa secara signifikan di kedua jenis sekolah, yang menunjukkan bahwa insentif berbasis kinerja dapat memotivasi sekolah untuk lebih fokus pada hasil belajar. Kedua, skema ini juga sukses meningkatkan kualitas dan kelengkapan sarana pendidikan, seperti fasilitas perpustakaan, media pembelajaran, dan fasilitas lainnya, dengan pemanfaatan dana insentif yang merata di SD negeri dan swasta. Ketiga, dalam hal tata kelola, PBF mendorong efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sekolah, serta memperkuat struktur perencanaan dan pelaporan keuangan. Keempat, meskipun kesenjangan mutu antara SD negeri dan swasta masih ada, perbedaan tersebut berhasil ditekan secara signifikan dari 2,6 poin menjadi 0,9 poin, yang menunjukkan bahwa PBF berpotensi besar dalam mengurangi ketimpangan pendidikan. Kelima, analisis statistik menunjukkan bahwa implementasi PBF memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan, dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,54. Kontribusi penelitian ini mengindikasikan bahwa PBF adalah kebijakan yang tepat untuk mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas, adil, dan inklusif. Namun, untuk mengoptimalkan dampaknya, program ini perlu didukung oleh pelatihan teknis, pemantauan yang konsisten, serta kebijakan afirmatif untuk sekolah-sekolah yang masih tertinggal.

REFERENCES

- Azahra, D. S., & Rahma, N. A. (2025). Kolaborasi Dan Solusi Sekolah Dalam Menghadapi Hambatan Pendidikan Inklusi Di SD Negeri Pekayon Kota Jakarta Timur. *Jurnal Pendidikan dan Kajian Humaniora*, 9(1), 1–7.
- Clever, D., Krist, F., Shinta, E., Br, B., Yolanda, J., Gaol, L., ... Tansliova, L. (2025). Tantangan dan Solusi Pendidikan Inklusi di Sumatera Utara : Mewujudkan Kesetaraan Pendidikan Untuk Semua Anak. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, 3(April).
- Gustaman, R. F., Gandi, A., Ratnaningsih, N., Siliwangi, U., Artikel, I., Inklusif, P., & Education, J. (2025). Implementasi pendidikan inklusif dalam mewujudkan sekolah ramah anak. *Jurnal Education and development*, 13(1), 660–666.
- Jogbakci, A., Aliya, N., Pratiwi, I. K., Surbakti, N., Bahasa, P., & Medan, U. N. (2025). Aksesibilitas Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi ABK : Studi Terhadap Implementasi Sekolah Inklusi. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(3), 4678–4687.
- Kusnadi, D., Abidin, J., Mulyana, & Dirta, A. R. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Pendidikan Inklusif: Telaah Pemikiran Muhammad Abduh tentang Pendidikan Modern Dede. *Attractive : Innovative Education Journal*, 4(1), 1–12.
- Lewa, M. J. (2025). Pendidikan Inklusif: Hak Pendidikan bagi Semua Anak Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research*, 2(1).
- Mahrus. (2025). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusif. *An Nabdhilyah Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4, 16–34.
- Matanari, M., & Berasa, T. (2025). Kompetensi Guru Agama Kristen dalam Mendidik Tanpa Diskriminasi Mengajarkan Firman Tuhan dengan Objektivitas. *Sabar : Jurnal Pendidikan Agama Kristen dan Katolik*, (April).
- Nurfadhilah, A. A., Astutiningsih, F., & Lukitoaji, B. D. (2025). Analisis Penerapan Pendidikan Inklusif terhadap Akses Kesetaraan Siswa. *Jurnal Pendidikan Anak Sekolah Dasar*, 1(1).
- Nurkholis, Ghinadi, A., Gunawan, J. V., Kusila, & Rohaeni. (2025). Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Pendidikan Inklusi Di SD Muhammadiyah 15 Surabaya. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10, 1–23.
- Pertiwi, E. P., Ali, A. Z., & Pudjiastuti, E. (2025). Filosofi dan Prinsip Dasar Pendidikan Inklusi : Implikasi terhadap Masalah Sosial Masyarakat. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(1), 329–346.
- Putri, R. A. (2025). Tahapan Legislasi Perda pada Pendidikan Inklusif Oleh DPRD kota Pariaman. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 02(01), 29–33.
- Ray, S., Das, J., Pande, R., & Nithya, A. (2025). Pendidikan Untuk Semua: Praktik Inklusi Dan Peran Guru Dalam Mengajar Siswa Dengan Kebutuhan Khusus. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10, 195–222. <https://doi.org/10.1201/9781032622408-13>
- Rosadi, K. I., Jeka, F., Saksitha, D. A., Wahyuni, D., Islam, M. P., Islam, U., ... Budaya, A. (2025). Kontribusi aspek sosial dan budaya dalam aplikasi kebijakan pendidikan nasional indonesia. *Jurnal Imiah Pendidikan Dasar (JIPDAS)*, 5(1), 404–423.
- Safitri, A. (2025). Pengarusutamaan Pendidikan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Agama Islam. *ILJ: Islamic Learning Journal (Jurnal Pendidikan Islam)*, 4(1), 1–23.

Sari, F., & Salistina, D. (2025). Menggagas Pendidikan Inklusi di PAUD melalui Pemahaman dan Kesiapan Mahasiswa. *Jurnal Raudhab*, 13(1), 30–40.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.